

ABSTRAK

Kebijakan persaingan usaha merupakan suatu topik penting dalam konteks perdagangan global karena hal ini memiliki konsekuensi yang dapat melampaui batas negara tertentu serta mempengaruhi kebijakan ekonomi pada suatu negara. Sebagai penelitian hukum bersifat yuridis normatif, tujuan penelitian ini adalah menganalisis kelemahan hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia dengan melakukan perbandingan dengan Amerika Serikat yang telah menerapkan asas ekstrateritorial. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Data yang terkumpul dari undang-undang buku, jurnal dan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-1/2010 KPPU yang menyatakan *Pfizer Inc* telah terlibat melakukan transaksi bisnis lintas batas berlandaskan pada perjanjian kartel, diolah dalam penelitian ini berdasarkan metode kualitatif. Setelah melakukan analisis, penelitian hukum ini menyimpulkan bahwa Indonesia menganut tidak hanya butuh mengimplementasikan berbagai doktrin yang diterapkan Amerika Serikat seperti *single economic entity* dan *effect doctrine* namun Indonesia sangat perlu mengesahkan Rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Karena berdasarkan perbandingan hukum dengan Amerika Serikat terdapat perbedaan sistem hukum dan sumber hukum dalam penegakan hukum yang dilakukan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sehingga dengan dilakukan pengesahan pada Rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, akan tercipta suatu kepastian hukum dalam penerapan asas ekstrateritorial berdasar pada analisis hukum ekonomi pada Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan dapat menciptakan hukum yang mempunyai perkembangan pasar yang dinamis.

Kata Kunci: Asas Ekstrateritorial, Persaingan Usaha, Antitrust Law

ABSTRACT

Business competition policy is an important topic in the context of global trade because thi has consequences that can transcend certain national boundaries and affect economic policies in a country. As a normatives judicial law research, the purpose of this study is to analyze the weaknesses of the business competition law in force in Indonesia by making a comparison with the United States which has applied the extraterritorial principle. This legal research uses a state approach, comparative approach and case approach. The data collected from the Book, journal, and Decision Law Number 17/KPPU-1/2010 which states that Pfizer Inc has been involved in conducting cross-border business transactions based on cartel agreement, is processed in this study based on qualitative methods. After conducting the analysis, this legal research concludes that Indonesia does not oley need to implement various doctrines applied by the United States such as the single economic entity and effect doctrine, but Indonesia really need to revise Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition. Because it is based on a comparison of the law enforcement between Indonesia and the United States. Thus, with the evasion of Law Number 5 of 1999, a legal certainty will be created in the application of extraterritorial principles based on analysis of economic law in the Law of business Competition in Indonesia and can create laws that are capable of dynamic market development

Kata Kunci: Extraterritoriality, Competition Law, Antitrust Law.